

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/1499/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA HIBAH KEGIATAN FASILITASI RINTISAN DESA PINTAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- menanamkan rangka dan a. bahwa dalam Pendidikan mengembangkan Karakter lingkungan dipandang perlu masyarakat, memberikan bantuan hibah kepada pihak masyarakat bagi Desa/Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Rintisan Desa Pintar Tahun 2019 Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Hibah Kegiatan Fasilitasi Rintisan Desa Pintar Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 2018 Tahun Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan

- Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Penerima Hibah Kegiatan Fasilitasi Rintisan Desa

Pintar Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran

Keputusan ini.

KEDUA: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU,

berupa 1 (satu) paket bantuan peralatan produksi

yang terdiri dari:

a. 1 (satu) buah meja;b. 2 (dua) buah kursi;

c. 1 (satu) buah almari/rak;

d. 1 (satu) buah papan data.

KETIGA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan

sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran

2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 4 Nopember 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
- Sdr. Kepala Desa penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

<u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1499/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 4 Nopember 2019

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEGIATAN FASILITASI RINTISAN DESA PINTAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	LOKASI	BANTUAN YANG			
		DIBERIKAN			
1	2	. 3			
1.	Desa Rancangkencono, Kecamatan	1 (satu) Paket			
	Lamongan	Peralatan Produksi			
2.	Desa Plosowahyu , Kecamatan Lamongan	1 (satu) Paket			
	77 1 1 200	Peralatan Produksi			
3.	Kelurahan Tiogoanyar, Kecamatan Lamongan	1 (satu) Paket Peralatan Produksi			
4.	Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan	1 (satu) Paket			
	3,7	Peralatan Produksi			
5.	Desa Geger, Kecamatan Turi	1 (satu) Paket			
<u> </u>	D. M	Peralatan Produksi			
6.	Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi	1 (satu) Paket Peralatan Produksi			
7.	Desa Sidorejo, Kecamatan Deket	1 (satu) Paket			
		Peralatan Produksi			
8.	Desa Deketwetan, Kecamatan Deket	1 (satu) Paket			
		Peralatan Produksi			
9.	Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung	1 (satu) Paket			
10.	Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung	Peralatan Produksi 1 (satu) Paket			
10.	Desa Tambaki gadung, Kecamatan Tikung	Peralatan Produksi			
11.	Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbahu	1 (satu) Paket			
		Peralatan Produksi			
12.	Desa Dumpiagung, Kecamatan	1 (satu) Paket			
10	Kembangbahu	Peralatan Produksi			
13.	Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi	1 (satu) Paket Peralatan Produksi			
14.	Desa Banjarejo, Kecamatan Sukodadi	1 (satu) Paket			
*	Dod Danjarojo, modanacam Danouda	Peralatan Produksi			
15.	Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng	1 (satu) Paket			
		Peralatan Produksi			
16.	Desa Karanggeneng Kecamatan	1 (satu) Paket Peralatan Produksi			
17.	Karanggeneng Desa Kendal, Kecamatan Sekaran	1 (satu) Paket			
17.	Desa Rendal, Recalliatan Scharan	Peralatan Produksi			
18.	Desa Manyar, Kecamatan Sekaran	1 (satu) Paket			
	•	Peralatan Produksi			
19.	Desa Babatkumpul, Kecamatan Pucuk	1 (satu) Paket			
	D D 1 i K	Peralatan Produksi			
20.	Desa Bugoharjo, Kecamatan Pucuk	1 (satu) Paket Peralatan Produksi			
21.	Desa Brumbun, Kecamatan Maduran	1 (satu) Paket			
	Dod Di anivan, mountain maaran	Peralatan Produksi			
22.	Desa Gumantuk, Kecamatan Maduran	1 (satu) Paket			
		Peralatan Produksi			
23.	Desa Datinawong, Kecamatan Babat	1 (satu) Paket Peralatan Produksi			
ŀ		refaiatali PTOUUKSI			
L					

24. 25.	2 Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring	3 1 (satu) Paket Peralatan Produksi
		Peralatan Produksi
25.	Desa Sumengko, Kecamatan Kedungpring	
		1 (satu) Paket Peralatan Produksi
26.	Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
27.	Desa Sugio, Kecamatan Sugio	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
28.	Desa Gondanglor, Kecamatan Sugio	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
29.	Desa Kacangan, Kecamatan Modo	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
30.	Desa Mojorejo, Kecamatan Modo	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
31.	Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
32.	Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
33.	Desa Songowareng, Kecamatan Bluluk	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
34.	Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
35.	Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
36.	Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
37.	Desa Mantup, Kecamatan Mantup	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
38.	Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
39.	Desa Wedoro, Kecamatan Sukorame	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
40.	Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
41.	Desa Karangbinangun, Kecamatan Karangbinangun	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
42.	Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
43.	Desa Mungli, Kecamatan Kalitengah	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
44.	Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
45.	Desa Glagah, Kecamatan Glagah	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
46.	Desa Karangagung, Kecamatan Glagah	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
47.	Desa Tunggul, Kecamatan Paciran	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
48.	Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
49.	Desa Lembor, Kecamatan Brondong	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
50.	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
51.	Desa Brangsi, Kecamatan Laren	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
52.	Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren	1 (satu) Paket Peralatan Produksi
53.	Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro	1 (satu) Paket Peralatan Produksi

1	2	3		
54.	Desa Payaman, Kecamatan Solokuro	1 (satu) Paket Peralatan Produksi		
55.	Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo	1 (satu) Paket Peralatan Produksi		
56.	Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo	1 (satu) Paket Peralatan Produksi		

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO NIP: 19680114 198801 1 001